





*Letter of Credit* adalah akad *Waka>lah* maka akibatnya bank hanya mendapatkan fee saja. Dan didalam *Letter of Credit* bank hanya sebagai perantara maka hanya menguntungkan salah satu pihak saja dengan adanya sistem bunga namun dengan dilakukannya akad *Waka>lah* di Bank Mandiri Syariah maka telah dilakukan transaksi islami tanpa bunga berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Islam melarang adanya bunga, untuk menghindari ketidakadilan dan bunga yang berlebihan, maka bank syariah telah memberikan solusi yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bank syariah telah dapat mengadopsi mekanisme L/C itu dengan menggunakan skema transaksi yang islami, seperti *musya>rakah*, *mud{a>rabah* ataupun *mura>bahah*. Hal ini dikuatkan lagi oleh fatwa yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional No. 34, bahwa L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad *Waka>lah bil Ujrah*, *Qard}*, *Mura>bahah*, *Salam/Istishna'*, *Mud}a>rabah*, *Musya>rakah* dan *Hawa>lah*. Dalam transaksi akad *Waka>lah bil ujrah*, bank hanya memperoleh pendapatan berupa fee saja atas jasa yang telah diberikan, yaitu untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor, karena disini importir memiliki dana sendiri. Besarnya *ujrah* disepakati diawal perjanjian secara pasti dalam bentuk nominal bukan prosentase untuk menghindari adanya riba. Demikian pula untuk transaksi L/C yang menggunakan akad *Qard}* (pinjaman).

Jika terdapat kelalaian dalam melaksanakan transaksi tersebut maka menjadi tanggung jawab bank kecuali kegagalan karena *force majeure* maka menjadi tanggung jawab nasabah. Namun bagi Bank itu sendiri proses *Letter of Credit* dengan akad *Wakalah* terdapat manfaat yaitu mendapatkan biaya administrasi, memberikan pelayanan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dan bank dilarang menerbitkan atau melakukan perubahan L/C apabila importir tidak memenuhi ketentuan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berlaku di bidang impor yang berkaitan dengan persyaratan sebagai importir, dan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya.

Pada dasarnya fasilitas *Letter of Credit* yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri Syariah adalah merupakan bentuk usaha untuk menghadapi perkembangan zaman dalam proses perdagangan antar negara dan hal ini merupakan fasilitas yang tergolong baru, sehingga adanya kekurangan dalam mekanismenya mungkin akan terjadi, Bank Mandiri Syariah berani menanggung resiko yang mungkin akan terjadi karena pada proses permohonan *Letter of Credit* Bank Mandiri Syariah telah mensyaratkan/ mempersiapkan tindakan pengamanan dengan memberlakukan aturan yang sesuai dengan undang-undang dan prinsip syariah.

Tata cara atau prosedur *Letter of Credit* adalah melalui pengisian formulir oleh nasabah yang disediakan oleh Bank Mandiri Syariah. Dan dalam formulir tersebut di dijelaskan bahwa barang yang akan di impor

telah diasuransikan jadi pihak Bank Mandiri Syariah tidak harus khawatir jika terdapat cacat pada barang yang diimpor. Begitu juga ketika barang tersebut telah dikirim kepada investor, pihak Bank Mandiri tidak ambil resiko dengan mencantumkan syarat khusus pada formulir permintaan *Letter of Credit* yang berbunyi “Penerima *Letter of Credit* wajib dan bertanggung jawab untuk mengatur segala sesuatunya untuk memungkinkan dan melancarkan pelaksanaan pemeriksaan oleh surveyor” hal tersebut boleh dilakukan karena perjanjian tersebut dijelaskan pada saat akad dilakukan dan sesuai kesepakatan bersama.

Sebenarnya dalam mekanismenya *Letter of Credit* tidak terdapat masalah meskipun proses *Letter of Credit* hal yang baru di Indonesia. Namun ketika transaksi impor atau ekspor dilakukan dengan negara yang berbeda prinsip maka atauran yang digunakan akan berbeda. Apalagi prinsip yang digunakan oleh bank mandiri adalah prinsip menurut ajaran islam. Katakanlah antara bank syariah dengan Bank konvensional yang menerapkan imbalan bunga, sedangkan bank syariah menerapkan imbalan bagi-hasil. Karena itu harus ada ketentuan dari awal dengan perjanjian antara bank prinsip apa yang akan dipakai, Demikian pula, sudah ada Peraturan Bank Indonesia (setara dengan Surat Keputusan Direksi) tentang PUAS (Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah) dan SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia).









*musyarakah* pihak nasabah dan bank sama-sama mengatur dan menentukan kebijakan usaha yang dijalankan.

Namun apabila sampai terjadi realisasi *musyarakah* pada proses *Letter of Credit*, maka memang pada dasarnya realisasi ini sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pemohon dan penerima *Letter of Credit*, bahwa apabila pemohon *Letter of Credit* dengan pembiayaan *musyarakah* telah sepakat maka akan menjadi hak penuh Bank untuk melakukan proses ekspor impor dan pihak nasabah mempunyai kewajiban mengembalikan dana yang diberikan oleh bank dalam menjalankan ekspor impor. Hal ini sesuai dengan hukum islam bahwa menepati janji adalah suatu kewajiban dan setiap orang harus bertanggung jawab atas janjinya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.